

BAB II
KESIAPAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PELUANG DAN TANTANGAN
MEA 2015

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah mulai diresmikan sejak 31 Desember 2015. MEA adalah bentuk komitmen ASEAN untuk mewujudkan perekonomian yang terintegrasi. MEA adalah cita-cita ASEAN untuk dapat menciptakan kemandirian regional, agar ASEAN menjadi kawasan yang kuat secara ekonomi dan mampu menyediakan kebutuhannya sendiri, sehingga aliran perekonomiannya akan kembali lagi ke ASEAN dan membuat ASEAN lebih kuat dalam menghadapi pasar global.

Ketika MEA mulai diresmikan pada Desember 2015 dapat dipastikan bahwa segala arus lalu-lintas barang, jasa, pendidikan, buruh terampil, arus modal lintas ASEAN akan mengalami liberalisasi. Selain itu adanya penghapusan hambatan tariff dan non tariff diharapkan dapat menjadi angin segar bagi para pelaku ekonomi antar regional ASEAN. Untuk memperjelas konsep Masyarakat ASEAN maka disusunlah Cetak Biru atau *Blueprint* yang menjadi “aturan main” dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Dalam Bab ini penulis akan mengulas sejarah disepakatinya MEA, apa saja poin utama kesepakatan yang telah ditulis dalam *Blueprint* MEA 2015, bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA, dan bagaimana posisi daya saing Industri Indonesia dalam menghadapi MEA.

A. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN

ASEAN adalah sebuah organisasi regional yang terdiri atas sepuluh negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, Thailand,

Filipina, Singapura, dan Malaysia. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan pembangunan sosial dan budaya pada Regional ASEAN, serta memelihara perdamaian dan stabilitas wilayah antar negara anggotanya. Selama 40 tahun berdirinya ASEAN telah banyak ditandatangani deklarasi, ide-ide dan gagasan-gagasan penting terkait cita-cita ASEAN untuk menjadi kawasan yang maju, aman, makmur dan terintegrasi. Berikut adalah tabel keanggotaan ASEAN diurutkan dari negara yang lebih dahulu bergabung, hingga negara yang baru saja bergabung.

MEA adalah cita-cita ASEAN untuk dapat menciptakan kemandirian regional, agar ASEAN menjadi kawasan yang kuat secara ekonomi dan mampu menyediakan kebutuhannya sendiri, sehingga aliran perekonomiannya akan kembali lagi ke ASEAN dan membuat ASEAN lebih kuat dalam menghadapi pasar global. Terutama ditengah ekspansi produk Cina dan India yang banyak digemari karena harganya terjangkau dan fiturnya lengkap. MEA didukung penuh oleh seluruh Negara Anggota ASEAN. Berikut adalah tabel keanggotaan ASEAN dengan tanggal awal bergabung dalam ASEAN.

Tabel Keanggotaan ASEAN

Tabel .2.1 Negara Anggota ASEAN

Brunei Darussalam	8 Januari 1984
Kamboja	30 April 1999

Indonesia	8 Agustus 1967
RRD Laos	23 Juli 1997
Malaysia	8 Agustus 1967
Myanmar	23 Juli 1997
Filipina	8 Agustus 1967
Singapura	8 Agustus 1967
Thailand	8 Agustus 1967
Vietnam	28 Juli 1995

ASEAN Community atau Masyarakat ASEAN yang mulai diimplementasikan setelah 31 Desember 2015, ternyata memiliki perjalanan yang cukup panjang sebelum akhirnya disepakati oleh negara anggota ASEAN. Dimulai dengan “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia, konflik Malaysia dan Thailand tentang klaim teritorial Sabah, lepasnya Singapura dari federasi Malaysia dll, menjadi pertimbangan utama mengapa ASEAN Community perlu dibentuk. Salah satunya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN, dan menciptakan rasa percaya serta meminimalisir konflik dan meredam rasa saling curiga antar negara anggota ASEAN., serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. ASEAN Community dibentuk untuk mencapai kawasan yang terintegrasi antar negara- negara di ASEAN. ASEAN menyadari kini kerjasama ASEAN tidak melulu hanya dibidang ekonomi seperti yang awalnya difokuskan oleh ASEAN seperti *preferensi perdagangan (preferential trade)*, *usaha patungan (joint ventures)*, dan *skema saling melengkapi (complementation scheme)* antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, tapi juga perlu melingkupi bidang politik-keamanan dan sosial

budaya, sehingga teretuslah kesepakatan ASEAN community dalam 3 pilar utama yaitu *ASEAN Political Security Community (APSC)*, *ASEAN Economic Community (AEC)*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*.

Gagasan awal dibentuknya masyarakat atau komunitas ASEAN ini dimulai dengan pertemuan perwakilan negara anggota ASEAN di KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada Desember 1997. Para pemimpin ASEAN pada waktu itu bercita-cita ingin mewujudkan wilayah yang terintegrasi satu sama lain di regional ASEAN, dan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang. Setelah KTT ASEAN di Kuala Lumpur, dilanjutkan pembicaraan lebih lanjut tentang konsep komunitas ASEAN ini Pada KTT ASEAN di Bali Oktober 2003, Para Pemimpin ASEAN mendeklarasikan bahwa MEA merupakan tujuan integrasi ekonomi regional (*Bali Concord II*) pada tahun 2020. Dalam pertemuan ini disepakati dua pilar integral lain dari komunitas ASEAN yaitu Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN .

Selanjutnya pada tahun 2004 para petinggi ASEAN kembali bertemu dalam KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, dengan hasil *Vientiane Action Program (VAP)* yang merupakan panduan untuk mendukung implementasi pencapaian AEC di tahun 2020 . Pada Agustus 2006 saat pertemuan ke-38 Menteri Ekonomi ASEAN, di Kuala Lumpur, Malaysia sepakat untuk menyusun *Blue Print* dengan tujuan mematangkan konsep Komunitas ASEAN agar Komunitas ASEAN ini segera dapat diimplementasikan sesuai dengan *Bali Concord II*, untuk mengakomodir segala kepentingan seluruh Negara anggota ASEAN. Kemudian Pada 13 Januari 2007 saat KTT ASEAN Ke-12, para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan *BALI CONCORD II*, dan menandatangani *Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*.

Persaingan pasar internasional semakin ketat, ditambah dengan kemajuan signifikan ekspansi produk dari Cina dan India, membuat para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang pada awalnya dijadwalkan untuk dimulai pada 2020 akan dipercepat menjadi per akhir tahun 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, akan diliberalisasi secara penuh, serta aliran modal yang lebih bebas. Sebagai landasan legal dan konstitusional bagi negara anggota ASEAN maka disusunlah *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN). Selanjutnya, Indonesia telah meratifikasi piagam tersebut dengan menerbitkan UU no. 38 tahun 2008 sebagai payung berbagai perjanjian kerjasama di tingkat ASEAN. (Ditjen PPHP Pertanian, 2015)

Masyarakat ekonomi ASEAN menjadi sebuah proyek besar yang bercita-cita ingin menjadikan ASEAN sebagai single market yang dinamis, kompetitif, dan kuat dipasar global. Semangat ASEAN community pun semakin giat digalakkan diseluruh negara anggota ASEAN, demi mempersiapkan seluruh instrumen dikawasan ASEAN untuk mencapai cita-cita ASEAN untuk mencapai level ekonomi yang maju dan kuat serta bersaing dipasar global yang semakin ketat. Dengan disepakatinya ASEAN Community per 31 desember 2015, artinya pertanggal 31 Desember 2015 segala arus pergerakan barang, jasa, pendidikan lintas ASEAN, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi. Serta aliran modal akan dikurangi hambatannya. Sehingga diharapkan percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN akan lebih cepat dicapai.

Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) dibentuk dengan tujuan untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi internasional baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. (Jurnal kajian internasional Lemhannas RI, edisi 16 materi 6) Dengan diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN maka diharapkan segala lalulintas perekonomian yang melintasi antar negara anggota

ASEAN akan mendapatkan perlakuan yang setara seperti suatu negara memperlakukan produk dari negaranya sendiri. Semua elemen dan instrumen lingkup ASEAN hendaknya bahu membahu dalam semangat *One Vision, One Identity and One Community* sehingga diharapkan dapat dicapainya Masyarakat ASEAN yang kompetitif, mandiri, sejahtera dan hidup dalam suasana yang aman dan dinamis.

B. Daya saing Indonesia dalam menghadapi MEA 2015

Ketika MEA mulai diresmikan pada Desember 2015 dapat dipastikan bahwa segala arus lalu-lintas barang, jasa, pendidikan, buruh terampil, arus modal lintas ASEAN akan mengalami liberalisasi. Selain itu adanya penghapusan hambatan tariff dan non tariff diharapkan dapat menjadi angin segar bagi para pelaku ekonomi antar regional ASEAN. Untuk memperjelas konsep Masyarakat ASEAN maka disusunlah Cetak Biru yang menjadi “aturan main” dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi ASEAN melalui AEC, maka dibuatlah *AEC Blueprint* yang memuat empat pilar utama yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Kerjasama dibidang ekonomi yang telah dilakukan adalah :

1. Membuka pusat promosi ASEAN dibidang perdagangan, investasi dan pariwisata.
2. Menyediakan cadangan pangan ASEAN terutama beras.
3. Membentuk kerjasama dibidang Koperasi ASEAN.
4. Membentuk komite Negara-negara penghasil minyak bumi ASEAN.
5. Membentuk kerjasama pengelolaan barang sejenis seperti karet alam dan kopra.
6. Mendirikan *AFTA* (*Asean Free Trade Area*) ; penurunan tariff dan penghapusan hambatan non tariff dalam perdagangan yang dimulai pada tahun 2002. (Ina Risdiani , 2013)

Hal ini menunjukkan keseriusan dan tekad ASEAN untuk mempercepat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat ASEAN. Persaingan pasar bebas ASEAN ini setiap negara lebih leluasa dalam aktifitas perekonomiannya, hal ini berdampak pada kemudahan para pelaku ekonomi untuk menembus pasar ASEAN pada khususnya, dengan hambatan yang relatif kecil dan liberalisasi yang seluas-luasnya. Sehingga dapat mendorong kreatifitas pelaku ekonomi dalam skala kecil maupun besar untuk dapat meningkatkan mutunya dipasar Internasional ASEAN. Sebab pada era MEA, produk ASEAN akan bersaing ketat. Kini pesaing produk di Indonesia bukan hanya produk-produk lokal saja, namun produk ASEAN akan turut membanjiri pasar Indonesia. Maka dari itu hendaknya pelaku ekonomi, pebisnis, maupun produsen terus melakukan inovasi agar produknya dapat bersaing dengan produk negara anggota ASEAN lainnya. MEA diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk sesama anggota ASEAN dalam bahu membahu meningkatkan ekonomi regional, ASEAN memiliki potensi ekonomi lebih kuat dan maju, bahkan dapat bersaing dengan ekspansi produk China dan India.

ASEAN merupakan *market* yang cukup strategis dengan populasi sekitar 600 juta penduduk dengan jumlah usia produktif yang cukup tinggi, memiliki sumberdaya alam yang cukup kaya, sumberdaya manusia yang bersaing dan terampil, produktifitas dalam hal agrikultur, manufaktur dan jasa yang cukup baik, Investasi asing langsung yang cukup kuat dan didukung

dengan jaringan yang kuat dan stabil menjadi beberapa poin penting kekuatan market ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun adapun kelemahan diantaranya adalah kesenjangan sosial yang cukup mencolok antar anggota ASEAN, terutama dalam hal pendapatan, pendidikan, pertumbuhan populasi ,pertumbuhan ekonomi, daya saing manusia, dan perbedaan nilai upah yang mencolok antar anggota ASEAN, nyatanya menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan Integrasi kawasan yang mandiri dan kuat secara ekonomi.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi perekonomian yang cukup strategis, sebab memiliki sumberdaya alam yang kaya, lingkungan yang cukup kondusif dan relatif aman, serta memiliki sumber daya manusia yang cukup mumpuni. Dengan jumlah usia produktif tertinggi di ASEAN yaitu 110 juta penduduk. Hal ini menjadi poin penting untuk dapat memanfaatkan momentum liberalisasi pasar ASEAN ini. Dalam hal daya saing indonesia cukup baik sebab berada di peringkat 50 dari 144 negara, atau peringkat 5 dalam ASEAN. Demikian menjadi hal yang perlu diapresiasi. Kendati begitu, rupanya terdapat kesenjangan yang cukup mencolok dalam lingkup ASEAN , yang cukup menjadi perhatian bagi Indonesia.Seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Daya Saing Negara Anggota ASEAN

Daya Saing Negara-negara Anggota ASEAN Tahun 2012-2013

Negara	Rangking Daya Saing GCI	Basic	Efficiency Enhancers	Innovation and Sophistication
Indonesia	50	58	58	40
Malaysia	25	27	23	23
Singapura	2	1	1	11
Thailand	38	45	47	55
Philipina	65	80	65	64
Brunei	28	21	68	62
Cambodia	85	97	85	72
Laos	na	na	na	na
Myanmar	na	na	na	na
Vietnam	75	91	71	90

Sumber : World Economic Forum 2012-2013

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa ASEAN memiliki potensi yang cukup baik dalam hal daya saing dunia. Singapura misalnya,telah berhasil menjadi peringkat 2 daya saing dunia. Sedangkan Indonesia menduduki peringkat 50, dan masih banyak negara anggota ASEAN yang menduduki peringkat diatas 50, misalnya kamboja yang menduduki peringkat 97. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kesenjangan yang cukup mencolok yang terjadi justru didalam tubuh ASEAN itu sendiri. Kesenjangan yang terlalu besar ini dikhawatirkan akan memicu konflik dalam ASEAN dan dapat mengancam integrasi regional ASEAN.

Bukan hanya masalah kesenjangan dalam hal daya saing ekonomi, namun terdapat pula kesenjangan yang cukup signifikan dalam hal *Human Development* atau pembangunan manusia di ASEAN.seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 Human Development Index ASEAN 2010-2012

Human Development Index ASEAN Tahun 2010-2012

Negara	2010	2011	2012
Myanmar	0.490	0.494	0.498
Cambodia	0.532	0.538	0.543
Laos	0.534	0.538	0.543
Vietnam	0.611	0.614	0.617
Indonesia	0.620	0.624	0.629
Filipina	0.649	0.651	0.654
Thailand	0.686	0.686	0.690
Malaysia	0.763	0.766	0.769
Brunei Darussalam	0.854	0.854	0.855
Singapura	0.892	0.894	0.895

Sumber : Human Development Report, ASEAN

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua negara di ASEAN mengalami peningkatan dalam indeks pembangunan manusia, namun terjadi kesenjangan yang cukup signifikan diantara negara-negara tersebut. Sebagai contoh Singapura memiliki indeks hampir 0,9 begitupula dengan brunei darussalam. Indonesia berada di tengah-tengah dibawah

filipina, kemudian Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar berada di level terendah di ASEAN dalam hal pembangunan manusia. Dengan diadakannya *ASEAN economic community* inilah diharapkan masyarakat ASEAN akan mengalami pemerataan dan kemajuan dalam hal daya saing dan indeks pembangunan manusianya.

Kesenjangan lainnya yang perlu diwaspadai adalah soal upah. Terjadinya kesenjangan upah ini dikhawatirkan dapat memicu konflik internal ASEAN dan menghambat integrasi ASEAN community dibidang khususnya Ekonomi. Sampai dengan Maret 2013 (periode 1 Januari 2008 - Maret 2013), tingkat implementasi kebijakan (*measures*) di bawah Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dari seluruh negara anggota ASEAN mencapai 77.54%, naik dari 74.20% pada Oktober 2012 (Sumber: Sekretariat ASEAN/AEC *Scorecard*). Terkait dengan ASEAN *Economic Community (AEC) Scorecard*, total implementasi Indonesia (periode 2008 - 2013) mencapai 83,2% atau kedua terendah setelah Laos. Beberapa kendala menuju AEC 2015 yang digarisbawahi dan perlu menjadi perhatian para *Leaders* dalam upaya menuju MEA 2015 meliputi: terhambatnya implementasi beberapa *measures* (*trade facilitation*, liberalisasi sektor jasa, dan ratifikasi perjanjian perhubungan), kondisi perekonomian dunia yang masih stagnan dan kecenderungan negara untuk lebih proteksionis, sehingga masuknya arus perdagangan dan investasi akan terhambat serta memastikan MEA sejalan dengan kebutuhan pasar. (Jurnal edisi 16 materi 6 Lemhannas RI, 2013)

Hal ini menjadi tantangan yang besar bagi Indonesia yang menduduki peringkat ke-tiga terbawah dalam hal upah, disusul vietnam dan kamboja paling bawah. Upah yang kecil memiliki dua sisi yaitu negatif dan positif. Sisi positifnya adalah upah yang kecil akan mengundang MNC untuk berinvestasi di negara tersebut, hal ini dapat menambah lapangan pekerjaan atau mengurangi angka pengangguran. Di sisi negatif yaitu kecilnya upah di suatu negara dapat menjadi gambaran buram kesejahteraan pekerjanya.

Di Indonesia sering kali masalah upah ini menjadi pemicu konflik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Banyaknya demonstrasi menuntut kenaikan upah menjadi suatu permasalahan yang cukup panjang dan melelahkan. Bahkan dapat mengancam keamanan masyarakat dan menurunkan produktifitas ekonomi di Indonesia. Banyaknya demonstrasi ini dapat menjadi masalah baru, sebab dapat memperngaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia dengan alasan keamanan dan jaminan keberlangsungan usahanya .

Di Vietnam misalnya, banyak investor berbondong-bondong datang untuk menanamkan modalnya dan membuka perusahaan multinasional disana karena tingkat upah yang relatif lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lain, serta sangat jarang nya buruh yang berdemonstrasi meminta kenaikan upah. Buruh disana cenderung “pasrah” menerima standar upah yang ditetapkan pemerintah. Hal ini yang menjadi daya tarik utama bagi para investor. Hal ini yang masih menjadi tantangan bagi Indonesia, yaitu bagaimana agar sumberdaya manusianya semakin unggul dan terampil, dan mendapatkan kesejahteraan yang pantas sehingga tidak ada lagi ricuh demonstrasi menuntut kenaikan upah. Sehingga para Investor akan tertarik menanamkan modalnya di Indonesia lebih banyak lagi. Sebab biar bagaimanapun posisi Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa begitu saja lepas dari aliran modal para investor. Indonesia membutuhkan modal untuk membantu menghidupkan sendi-sendi perekonomian negara yang sempat lemah.

Indonesia hendaknya terus mematangkan strategi penguatan ekonomi dalam menghadapi pasar bebas ASEAN dalam MEA 2015 nanti, sebagai negara berkembang Indonesia perlu meningkatkan perekonomiannya dengan serius untuk mencapai kesejahteraan nasional, dan MEA ini seharusnya menjadi momentum yang berharga dalam mengibarkan sayap perekonomian Indonesia tentunya dengan diimbangi strategi yang matang dan persiapan yang tepat. Sebab, di persaingan bebas dan terbuka antar anggota ASEAN ini, jika kita ceroboh sedikit saja, dapat dijadikan celah bagi anggota ASEAN lain untuk memenangkan kompetisi ekonomi ini. Jangan sampai pasar nasional justru menjadi “lapak emas” bagi negara lain. Meskipun tema yang diusung

oleh Masyarakat ASEAN adalah “satu visi, satu Identitas, namun tidak dipungkiri bahwa produk utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN ini adalah “Kompetisi”. Hanya ada dua pilihan, yaitu “bertahan” yang artinya kita akan semakin tertinggal, atau “menyerang” yang artinya kita akan terus melaju, berkompetisi dengan progres yang signifikan dan memimpin kompetisi ini. Hal ini tentu bukan hanya mimpi bagi Indonesia, jika segala elemen dan segala instrumen dapat digerakkan dan dipersiapkan dengan strategi yang tepat bukan tidak mungkin kelak Indonesia akan mencapai percepatan ekonomi dengan signifikan di jajaran anggota ASEAN.

C. Kesiapan Indonesia Mengadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Seperti yang sudah disinggung dalam sub bab di atas, bahwa potensi ASEAN sangat besar dalam pertumbuhan ekonominya. Dengan jumlah total penduduk sekitar 600 juta jiwa, tentunya dapat menjadi pasar strategis dalam mewujudkan ASEAN sebagai single market. Artinya momentum MEA ini akan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ASEAN itu sendiri, dengan diberlakukannya MEA maka secara otomatis pasar ASEAN akan lebih diutamakan bagi produsen dari dalam ASEAN itu sendiri, meskipun tidak menutup kemungkinan akan tetap ada aktifitas ekspor dan impor produk dari dan keluar ASEAN. Namun, komitmen ASEAN adalah mengupayakan segala kebutuhan mulai dari barang mewah hingga sekedar permen atau jajanan anak-anak dapat diproduksi sendiri oleh negara anggota ASEAN. Sehingga segala lalu lintas perdagangan dan segala keuntungan yang diperoleh akan kembali lagi ke ASEAN demi kesejahteraan dan peningkatan perekonomian masyarakat ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) digadang-gadang akan menjadi tonggak awal dibukanya perdagangan bebas antar anggota ASEAN yang kemudian dimanfaatkan secara optimal oleh para negara member ASEAN untuk berlomba-lomba mempersiapkan warga negaranya untuk sadar akan liberalisasi dalam berbagai bidang, bukan saja dalam hal perdagangan namun juga

persaingan antar pekerja terampil dan pelajar lintas ASEAN yang diresmikan mulai 31 desember 2015. Sebab ketika MEA telah diresmikan otomatis persaingan kini bukan hanya berlangsung antar masyarakat dalam satu negara saja, namun 10 negara member ASEAN. Tentu hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kita. Artinya persaingan akan semakin ketat dan semarak, sebagai permisalan jika suatu negara dapat memaksimalkan persiapan warga negaranya dalam menghadapi MEA, maka MEA akan menjadi momentum untuk menyerap tenaga kerja atau mengurangi pengangguran. Namun, jika negara gagal mempersiapkan warganya, bukan tidak mungkin justru angka pengangguran semakin meningkat karena persaingan terbuka lebar. Disinilah letak peran penting pemerintah dalam memproteksi kepentingan nasionalnya.

Di era persaingan bebas MEA, Indonesia seharusnya cukup percaya diri menghadapi era pasar bebas MEA tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat kaya, baik di sektor pertanian, pertambangan, kelautan, yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang paling unggul dari segi sumberdaya alam di ASEAN. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu sekitar 237 juta penduduk dengan jumlah usia produktif sebesar 70% dan angka tenaga kerja sebesar 110 juta penduduk (data BPS 2007). Disamping itu keadaan politik dan keamanan Indonesia yang relatif aman dan stabil seharusnya menjadi modal utama bagi Indonesia dalam menghadapi kompetisi MEA. Indonesia juga memiliki GDP tertinggi se ASEAN seperti yang ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Perbandingan Luas Wilayah, Jumlah Populasi,Perdagangan dan Investasi langsung
ASEAN 2011

ASEAN—Differences in Size, Level of Development, and Trade and FDI Dependence, 2011

	Brunei Darussalam	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	Cambodia	Lao PDR	Myanmar	Viet Nam
Population (million)	0.4	237.7	29.0	95.8	5.2	67.6	14.5	6.4	60.4	87.8
Land area (thous. sq km)	5.8	1860.4	330.3	300.0	0.7	513.1	181.0	236.8	676.6	331.1
GDP (\$ billion)	16.3	846.8	287.9	224.3	259.9	345.8	12.8	8.2	52.8	123.3
GDP per capita (\$)	38702	3563	9941	2341	50130	5116	879	1279	875	1403
GDP per capita (PPP-adjusted)	52059	4736	15955	4289	60744	8907	2287	2825	1393	3440
Merchandise trade (\$ billion)	14.8	380.9	415.7	111.8	775.2	458.9	12.8	4.0	14.9	199.6
Trade/GDP ratio (%)	90.8	45.0	144.4	49.8	298.3	132.7	100.0	48.8	28.2	161.9
Inward FDI stock (\$ billion)	12.5	173.1	114.6	27.6	518.6	139.7	6.9	2.5	9.1	72.8
Inward FDI stock/GDP ratio (%)	76.2	20.5	41.1	12.3	203.8	40.4	53.4	32.2	16.9	60.3

ASEAN = Association of Southeast Asian Nations; FDI = foreign direct investment; GDP = gross domestic product; PPP = purchasing power parity.

Source: Compiled from ASEAN (2013) and UNCTAD (2012).

sumber : AEC

blueprint and progress

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebenarnya posisi Indonesia cukup kuat diantara anggota ASEAN lain, meskipun GDP perkapita Indonesia masih dibawah Singapore, Malaysia, dan Brunei darussalam. Namun dari aspek-aspek lain Indonesia cukup bersaing. Indonesia sebagai negara member ASEAN dengan jumlah populasi terbanyak, seharusnya menjadi market terstrategis bagi aktifitas perdagangan produk ASEAN baik dalam bentuk investasi, barang , maupun jasa. Jika kita dapat mengoptimalkan dan mengutamakan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sebab siklus ekonominya akan dikembalikan lagi ke negara kita. Untuk itu perlu digalakkan kembali semboyan “cinta produk Indonesia”. Jangan sampai perilaku konsumtif dan bangga dengan produk impor justru membuat perekonomian kita semakin terpuruk. Daya saing produk dalam negeri harus ditingkatkan mengingat mutu dan kualitas produk luar seperti malaysia, singapura, dan thailand semakin bersaing.

Dalam menghadapi MEA, Indonesia masih akan mengandalkan 3 sektor utama yaitu sektor yang berbasis sumber daya alam, pasar yang strategis, dan ekonomi kreatif. Indonesia harus

mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi MEA, sebagai negara dengan populasi terbanyak ASEAN, tentu adalah kabar baik yang harus terus dipersiapkan sebagai basis produksi, minimal sebagai pemenuh kebutuhan nasional, dan mempersiapkan diri untuk bersaing dipasar Internasional khususnya di ASEAN. Indonesia perlu mendorong masyarakat terutama para pelaku usaha untuk tidak menjual bahan baku mentah begitu saja, namun dengan meningkatkan nilai tambahnya dengan mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bernilai, baik hasil kehutanan, kelautan, maupun pertanian.

Dalam mengukur kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 kita perlu melihat dari beberapa aspek utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, pertumbuhan ekspor, dan pendapatan perkapita masyarakat. Kesiapan Indonesia jika dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi Berdasarkan laporan pertumbuhan ekonomi yang dilansir oleh IMF pada tahun 2012, terlihat bahwa bahwa pada 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat stabil di kisaran 5,5 persen \pm 1 persen dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,11 persen. Sejak tahun 2007 hingga 2012, tingkat pertumbuhan hampir selalu di atas 6 persen dengan pengecualian tahun 2009 (4,6 persen). (Atep AbduRofiq,2015)

Pertumbuhan ekspor Indonesia secara kolektif sempat mengalami stagnansi terutama pasca krisis ekonomi tahun 1998, nilai ekspor non migas pada tahun 1990-1996 berada pada 16 persen per tahun, sementara setelah krisis moneter ekspor non migas mengalami penurunan hingga hanya mencapai 3 persen bahkan hingga akhir tahun 2003. Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor nasional juga mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2013, pertumbuhan ekspor non migas Indonesia mengalami peningkatan sebesar 6,5 persen dibanding November 2013, bila dibandingkan dengan Desember 2012 ekspor mengalami peningkatan sebesar 10,33 persen. Peningkatan ekspor Desember 2013 disebabkan oleh meningkatnya ekspor Nonmigas sebesar 3,09 persen demikian pula ekspor migas naik sebesar 23,07 persen. (Atep AbduRofiq, 2015). Meningkatnya presentase ekspor ini menjadi indikator kesiapan Indonesia menghadapi MEA.

Sedangkan dilihat dari pendapatan perkapita nasional terlihat bahwa masyarakat Indonesia mengalami peningkatan sebesar 8,8 persen, pendapatan perkapita nasional dari tahun 2012, yaitu dari 33,5 juta menjadi 36,5 juta. Namun pendapatan perkapita Indonesia yang sebesar US\$4.700 masih jauh jika dibandingkan Thailand yang mencapai kisaran US\$10.000, Malaysia mencapai US\$ 15.000 dan Singapura sudah melebihi US\$50.000, keadaan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum merata, kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bermasalah, secara penghasilan masyarakat Indonesia masih kalah dari negara lainnya. (Atep AbduRofiq,2015)

Terbukanya liberalisasi yang akan diresmikan dalam MEA menjadi peluang sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Disatu sisi kita akan lebih leluasa dalam berkompetisi meningkatkan taraf kesejahteraan melalui MEA, pekerja terampil kita akan lebih bebas berkarir ke lintas ASEAN dengan terbuka, namun disisi lain dalam jangka panjang kita juga terancam akan kehilangan pekerja-pekerja terbaik kita dalam migrasi besar-besaran yang mungkin terjadi pasca diresmikannya MEA. Namun begitu, secara keseluruhan Indonesia dapat dikatakan telah siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 nanti.

Peluang untuk berhasil dalam kompetisi pasar bebas MEA bukan mustahil dicapai oleh Indonesia, jika Indonesia dapat secara optimal mempersiapkan diri secara fisik yaitu salah satunya dengan mempersiapkan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi MEA, dan mempersiapkan sumberdaya manusia Indonesia yang harus siap bersaing di era liberalisasi MEA. Artinya secara kualitas sumberdaya manusia Indonesia harus mumpuni dan terampil sebab persaingan perebutan lapangan pekerjaan bukan hanya akan terjadi antar warga Indonesia saja namun juga dengan warga negara lintas ASEAN pada khususnya. Salah satu keuntungannya adalah jika sumberdaya manusia kita terampil dan berkualitas, tentu akan mudah menembus posisi strategis lapangan pekerjaan lintas ASEAN, namun juga sebaliknya, jika kurang persiapan maka justru lapangan pekerjaan di negara kita akan diserbu tanpa ampun oleh warga ASEAN lainnya.

Salah satu tantangan lain adalah kita harus siap menghadapi para pekerja vietnam dan laos yang standar upah pekerjaannya dibawah kita. Sebab, para pengusaha biasanya mencari pekerja yang upahnya cenderung kecil dan tidak terlalu banyak protes. Sedang kita tahu, di Indonesia demonstrasi menuntut kenaikan upah hampir terjadi setiap saat diberbagai wilayah. Harapan kita adalah pekerja terampil kita memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu mendapatkan posisi terbaik dalam lapangan kerja ASEAN. MEA memang menjadi ajang kompetisi yang bebas dan terbuka, namun peran pemerintah dalam memproteksi keluar masuknya warga negara Indonesia di lapangan pekerjaan ASEAN hendaknya dimatangkan, untuk mengantisipasi kehilangan sumberdaya manusia yang berkualitas, yang seharusnya ikut sumbangsih dalam pembangunan ekonomi Indonesia secara langsung.

D. Daya Saing Industri Indonesia dalam Menghadapi MEA

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam memimpin pasar bebas MEA yang telah diresmikan pertanggal 30 desember 2015 lalu, sebab Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar di ASEAN, tentu dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan perekonomian negeri dari sektor perdagangan, baik dari industri makanan-minuman, tekstil, kerajinan tangan, dan industri manufaktur lain. Namun, tentu Indonesia harus dapat mempersiapkan diri dengan meningkatkan daya saing industrinya dan memetakan potensi apa saja yang akan menjadi produk unggulan dalam kompetisi ekonomi MEA.

Berdasarkan data World Economy Forum (WEF), daya saing Indonesia berada di urutan 55 dunia pada 2008 dan kemudian menjadi peringkat 50 dunia tahun 2012. Indonesia masih jauh tertinggal dari Singapura di peringkat tiga dunia, Malaysia ke-25, dan Thailand urutan ke-38. Pemerintah boleh saja berbesar hati dan bangga dengan pertumbuhan industri yang terbilang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, biaya logistik yang terlampau mahal serta buruknya

infrastruktur membuat industri nasional “gugup” menghadapi AEC 2015. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor industri pengolahan migas pada 2012 lalu tumbuh 5,7% dan industri pengolahan non-migas meningkat 6,4% dan memberikan kontribusi sebesar 20,8 % dari total pertumbuhan produk domestikbruto (PDB) nasional. (majalah industri kementerian perindustrian,2013)

Di Indonesia infrastruktur dan mahalnya biaya logistik menjadi poin penting yang perlu dijadikan perhatian oleh pemerintah untuk mendukung lancarnya lalu lintas barang dan jasa dalam kompetisi MEA. Di Indonesia, biaya logistik saat ini rata-rata masih 16% dari total biaya produksi. Adapun normalnya maksimal hanya 9%-10%.

Ada sembilan sektor unggulan yang diusung oleh kementerian perindustrian dalam menghadapi MEA, dimana sembilan komoditas ini memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan barang yang sama dari negara ASEAN lain. Kesembilan komoditas tersebut di antaranya, produk berbasis agro seperti (CPO, kakao, karet), ikan dan produk olahannya, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, mesin dan peralatannya, serta logam dasar, besi dan baja. Selain sembilan komoditas unggulan, Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Perindustrian juga mengantisipasi adanya tujuh cabang industri yang memiliki potensi hambatan dalam menghadapi MEA. Tujuh komoditas tersebut diantaranya meliputi otomotif, elektronik, semen, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman serta furnitur. (Majalah Industri Kemenperin,2013:8)

Upaya pemerintah untuk mendukung majunya produktifitas dalam negeri dalam kegiatan ekonomi untuk menghadapi MEA diantaranya dengan terus membangun dan memperbaiki Infrastruktur, menekan biaya logistik, dan menjamin ketersediaan kebutuhan energi. Untuk menekan biaya produksi, para pelaku Industri di Indonesia mulai beralih dari minyak bumi ke gas bumi yang dinilai lebih efisien dan lebih murah. PGN sebagai BUMN yang bergerak disektor hilir

gas bumi, mendukung penuh pemerintah untuk menjamin ketahanan energi nasional terutama dalam menjamin ketersediaan kebutuhan industri dalam menghadapi MEA. Saat ini tercatat lebih dari 1500 Industri dalam negeri yang menjadi pelanggan PGN, tersebar diseluruh Indonesia. Beberapa diantaranya Industri Kimia, keramik, tekstil, makanan, minuman, dan listrik. Dengan menggunakan gas PGN yang relatif lebih murah, maka biaya produksi Industri dapat ditekan, sehingga Industri dalam negeri dapat bersaing baik dipasar domestik, maupun pasar global.